

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki pemerintahan yang berdaulat dan memiliki otoritas untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat pada wilayah tersebut. Negara pun memiliki hak dalam menjalankan kebijakan luar negeri dan mempertahankan kedaulatannya dari ancaman internal dan eksternal.

Menurut Mac Iver negara merupakan asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu distrik berlandaskan sistem dari suatu hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan sifat memaksa. (Soehino, 2005, p. 35)

Negara terdiri atas tiga elemen utama, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Suatu negara pada dasarnya mencakup daratan, laut, dan udara yang berada di bawah kedaulatan dan kendali negara tersebut. Rakyat negara sendiri terdiri dari individu-individu yang memiliki kewarganegaraan dan mengakui otoritas pemerintah. Pemerintahan yang berdaulat merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan serta menjalankan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk mengatur masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Negara memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, melindungi hak-hak warga negara, dan memajukan kesejahteraan

rakyat. Negara juga bertanggung jawab dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain melalui proses diplomasi dan kebijakan luar negeri untuk memajukan kepentingan nasional. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, seperti halnya demokrasi, monarki, republik, dan lain sebagainya, yang tentunya mewakili kebudayaan, tradisi, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakatnya.

Kepentingan nasional merujuk pada kebutuhan dan kepentingan yang dianggap penting bagi suatu negara dan masyarakatnya. Kepentingan nasional dapat mencakup berbagai bidang seperti keamanan, ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Kepentingan nasional sendiri sangat penting bagi suatu negara karena menentukan arah kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Sebagai contoh, kepentingan nasional dalam bidang keamanan yang mencakup upaya untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal dan internal. Serta mempertahankan stabilitas dan ketertiban dalam negeri. Sedangkan dalam bidang ekonomi, kepentingan nasional dapat mencakup upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menjaga stabilitas nilai tukar mata uang.

Kepentingan nasional dapat berbeda antara negara satu dengan negara lainnya, tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik masing-masing negara. Namun, ada beberapa kepentingan nasional umum dan diakui oleh hampir semua negara, seperti keamanan nasional, stabilitas politik dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat. Beberapa ahli berpendapat bahwa kepentingan nasional

bukan hanya bagian kekuasaan, tetapi meliputi kepentingan moral, agama, budaya, dan lain sebagainya, walaupun dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan kekuasaan yang cukup. (Bakry, 2017, p. 61).

Dalam meraih kepentingan negara tentu harus berkiprah di ranah internasional dan sebagian besar mengandalkan kekuatan dan potensi dari politik luar negeri yang dibangun oleh negara tersebut. Politik luar negeri merupakan salah satu instrumen penting bagi sebuah negara untuk memenuhi kepentingan nasional di tingkat internasional. Dalam konteks ini, politik luar negeri bertujuan untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional suatu negara di arena internasional, seperti melalui perdagangan, diplomasi, dan hubungan politik dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan interaksi dua negara atau lebih yang mempertimbangkan unsur dalam negeri dan luar negeri suatu negara. (Rosenau, 1976, p. 7) Dari apa yang disampaikan dalam buku Rosenau yang menyatakan bahwa suatu aktor dalam melakukan kepentingan nasional diharuskan memahami unsur dari suatu negara yang akan menjadi tujuan. Politik luar negeri memainkan peran penting dalam pemenuhan kepentingan nasional suatu negara di tingkat internasional. Dengan berbagai strategi dan upaya yang tepat, suatu negara dapat memperkuat posisinya di tingkat global serta meningkatkan kemakmuran dan keamanan bagi rakyatnya.

Organisasi internasional merupakan badan yang dibentuk oleh beberapa negara untuk bekerja sama dalam suatu bidang atau masalah tertentu di tingkat internasional. Tujuan dari organisasi internasional beragam, mulai dari mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional, memajukan kerja sama

ekonomi, hingga memperjuangkan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Adapun beberapa contoh organisasi internasional yang terkenal antara lain PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), WTO (Organisasi Perdagangan Dunia), IMF (Dana Moneter Internasional), serta organisasi regional seperti ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) dan EU (*European Union*).

Menurut Suryokusmo organisasi internasional merupakan suatu kelompok yang anggotanya dari tiap negara-negara dan memiliki sistem yang tetap atau perangkat bidang-bidang yang tugasnya mencapai tujuan bersama dengan melakukan kerjasama antara anggotanya. (Suryokusmo, 2007, p. 1). Organisasi internasional dapat membantu negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan bersama melalui koordinasi dan kerja sama, serta menyediakan forum untuk negosiasi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan isu-isu internasional. Selain itu, organisasi internasional juga dapat menjadi penghubung antara negara-negara anggotanya dengan negara-negara lain di tingkat internasional.

Dalam konteks kepentingan nasional, organisasi internasional dapat menjadi alat penting bagi suatu negara untuk memperjuangkan dan memajukan kepentingannya di tingkat global. Namun demikian, untuk dapat mencapai tujuan tersebut, suatu negara juga harus mempertimbangkan kerja sama dan konsensus dengan negara-negara lain, serta mengakomodasi kepentingan global yang lebih luas.

PBB merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1945 di San Francisco, tujuan organisasi ini adalah mencegahnya bencana seperti perang dunia II, dengan pemeliharaan perdamaian dunia. Terdapat lima anggota tetap DK PBB yang

disebut sebagai P5 yakni Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris dan Republik Rakyat China, P5 memiliki kekuatan hak veto yaitu kekuasaan untuk memblokir resolusi yang bahkan telah ditetapkan oleh mayoritas anggota DK PBB. Secara garis besar keanggotaan DK PBB terbagi menjadi dua, yaitu permanen dan tidak permanen. Permanen disini merupakan P5 dan anggota tidak permanen terdapat 10 kursi dengan pembagian secara regional. Anggota tidak permanen atau sering disebut Anggota tidak tetap DK PBB memiliki tujuan sebagai ruang khusus untuk isu-isu yang tidak mendapatkan sorotan dunia. (Norlyanti, p. 103).

Indonesia merupakan salah satu anggota PBB yang mulai tergabung sebagai anggota pada tanggal 28 September 1950. setelah banyak sejarah yang telah Indonesia alami di PBB. Indonesia memulai tugas keanggotaan tidak tetap Dewan keamanan (DK) PBB pada 1 Januari 2019 dan berakhir pada 31 Desember 2020. Sebelumnya Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB pada tahun 1974-1975, 1995-1996, dan 2007-2008. Walaupun tidak asing, karena merupakan yang keempat kalinya, Indonesia telah membuktikan kemampuannya dalam bersaing dengan negara-negara besar. Tentunya, dengan hal ini banyak manfaat menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB (Kementerian Republik Indonesia, 2019)

Dewan keamanan PBB memiliki peran yang strategis dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Tentu saja hal ini menjadi daya tarik bagi negara-negara anggota PBB. Tugas yang diamanatkan DK PBB yaitu menjalankan fungsi investigasi atas suatu permasalahan sengketa ataupun situasi yang dapat mengarah kepada konflik internasional, memberikan rekomendasi

penyelesaian terhadap suatu masalah, memberikan sanksi dan memberikan otoritas penggunaan kekuatan untuk mengantisipasi peperangan dan memberikan perdamaian dan keamanan internasional. (Wikipedia, 2023).

Bagi Indonesia, menjadi DK PBB merupakan peran strategis demi mewujudkan visi global, prinsip dasar Indonesia memilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB terdapat di Pancasila, memenuhi amanat konstitusi UUD 1945, dan Dasasila Bandung, dengan maksud menyelesaikan berbagai masalah global yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia. (RI K. , 2019)

Secara resmi Indonesia menyatakan kesiapan sebagai calon DK PBB periode 2019-2020, pernyataan ini disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada saat itu yaitu Jusuf Kalla pada sidang umum PBB tanggal 23 September 2016 sesi ke-71. Lalu dipertegas kembali keinginan menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada sidang umum PBB pada September 2017. Dalam acara seminar Peran dan Pencapaian keanggotaan tidak tetap Indonesia di Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Grata E. Wardaningtyas sebagai direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Direktorat Jendral Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia menjelaskan prioritas utama Indonesia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB pertama memberikan penyelesaian konflik untuk mencegah terjadinya perang, kedua menjaga sinergitas antara organisasi regional dengan dewan keamanan PBB, ketiga mendukung global *comprehensive approach* untuk perangi terorisme, radikalisme dan ekstrimisme,

tercapainya sinergi anatar perdamaian dan pembangunan berkelanjutan (FISIP, 2019).

Sebagai sebuah negara yang memiliki peran penting di kawasan Asia Tenggara dan dunia, Indonesia selalu mengutamakan kepentingan nasionalnya dalam berbagai kebijakan luar negeri yang diambil, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia saat ini, Retno Marsudi, memegang peran penting dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dalam politik internasional. Sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menjabat dari 27 Oktober 2014 hingga 22 Oktober 2019 dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Retno Marsudi kembali dipercaya dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Luar Negeri pada 23 Oktober 2019 untuk Kabinet Indonesia Maju periode 2019 hingga 2024.

Strategi dalam melakukan dukungan internasional sebelum pemilihan Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi melaksanakan berbagai pertemuan dan forum internasional. Pendekatan yang dilakukan yang pertama adalah *Regional Grouping* dengan meminta dukungan dari kelompok negara kawasan yang menjadi anggota PBB, serta dukungan dari organisasi regional, yang di mana Indonesia termasuk ke dalam anggotanya, kemudian Menteri Retno Marsudi mengembangkan pendekatan bilateral timbal balik dalam proses pencalonan dengan menjalin kerja sama dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa dengan Indonesia dalam isu-isu global. Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat posisinya di DK PBB melalui dukungan dari negara-negara mitra tersebut. Strategi lain yang

dilakukan Retno Marsudi bersama timnya yaitu melakukan lobi intensif ke negara-negara yang berada di luar organisasi yang telah memberikan dukungan institusional dan dukungan timbal balik, begitu pula dengan citra positif yang dilakukan Menteri Retno Marsudi tentang peran Indonesia sebagai pencipta perdamaian dunia. Persuasi bilateral ke negara pesaing juga dilakukan Menteri Retno Marsudi dengan mengajukan konsesi-konsesi tertentu. Indonesia mengusung jargon "*The True Partner for World Peace*". Dalam masa kampanye terakhirnya, Retno Marsudi menyampaikan pidato debat di Markas PBB New York dengan judul "*On Upholding International Law Within the Context of the Maintenance of International Peace and Security*" di ajang *High Level Open Debate on Respecting International Law*. Hasilnya, Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 dengan dukungan sebanyak 144 dari 190 negara anggota PBB. (Nugroho, 2016)

Idiosinkratik merupakan sebuah aspek yang dimiliki oleh seorang pembuat keputusan seperti bakat, nilai dan pengalaman yang mempengaruhi proses dalam membuat keputusan. Idiosinkratik melekat pada suatu citra, persepsi, image dan karakteristik pembuat keputusan. Menteri Retno Marsudi telah menunjukkan idiosinkratik dan ciri khasnya yang istimewa. Dalam memahami idiosinkratik Retno Marsudi dalam menjalankan tugasnya bisa dilihat dari mulai ideologi, kepribadian politik, gaya kepemimpinan, cara pandang dan gaya dalam mengambil keputusan. Salah satu contoh dari kepribadian politik Retno Marsudi adalah fokus pada diplomasi perdamaian, penyelesaian konflik secara damai dan

juga kemanusiaan. Retno Marsudi sering kali melakukan kunjungan ke negara-negara yang menjadi mitra strategis Indonesia.

Dalam pendekatan dengan negara-negara lain, Menteri Retno Marsudi melakukan relasi non-formal, begitupun dengan obrolan-obrolan ringan dengan negara sahabat sehingga menjadikan modal yang berguna bagi berbagai proses perundingan maupun pada forum-forum Internasional, hal ini lah yang disebut-sebut sebagai salah satu langkah lobi. Lobi dimaknai sebagai pendekatan yang menjurus kepada suatu tujuan yang menguntungkan baik untuk satu ataupun kedua belah pihak dengan memengaruhi sasaran agar mempunyai pandangan positif terhadap topik (Zainal, 2006)

Sebagai contoh, Menteri Retno Marsudi sering kali menekankan pentingnya kerja sama regional dan internasional dalam menangani isu-isu keamanan dan perdamaian global, seperti terorisme, radikalisme, dan perdagangan manusia. Ia juga memperjuangkan isu-isu lingkungan dan perubahan iklim, serta mengadvokasi hak-hak perempuan dan anak-anak. Selain itu, Retno Marsudi juga mengambil peran aktif dalam mengupayakan solusi damai bagi konflik-konflik di kawasan dan dunia, termasuk di Myanmar, Palestina, dan Afghanistan. Dalam hal ini, ia berupaya untuk mempromosikan dialog dan mediasi sebagai cara untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, Retno Marsudi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan keamanan PBB melalui upayanya yang intensif dalam diplomasi multilateral dan dialog, ia

berusaha untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas global yang berkelanjutan serta mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Sosok Menteri Retno Marsudi telah dikenal sebagai tangan dingin yang berarti selalu membuahkan hasil bagi negara Indonesia. Menteri Retno Marsudi telah menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kebijakan dalam negeri, dan bahwa Indonesia selalu berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (Sinaga, 2019)

Lewat diplomasi yang dilakukan Menteri Retno Marsudi membuat langkah Indonesia di kancah internasional semakin besar. Dengan dijadikannya Indonesia sebagai salah satu anggota tidak tetap dewan keamanan internasional, setelah terakhir kali Indonesia menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB pada 2008. Otomatis hal tersebut menjadi perbandingan antara periode sebelum masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan masa kepemimpinannya saat ini, hal yang digaris bawahi adalah dalam seluruh aspek yang dilakukan Menteri Retno Marsudi di dunia internasional, khususnya di organisasi internasional yaitu PBB memiliki arti tersendiri bagi Indonesia, terutama dalam kepentingan nasionalnya.

Pada awal kemenangan Indonesia menjadi Anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia mempunyai empat prioritas dan satu isu khusus mengenai Palestina. Pertama menolak Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kedua, melakukan desakan kepada PBB agar melaksanakan prinsip demokrasi terhadap *status quo* Israel. Ketiga, menegaskan bahwa Indonesia mendukung Palestina dalam pertemuan OIC *Extraordinary Summit* di Istanbul, Turki. Keempat, Indonesia membebaskan biaya

masuk kurma dan minyak zaitun asal sejak tahun 2018 sehingga Palestina mendapatkan keuntungan. Selain itu, Indonesia menjadi negara pengirim pasukan perdamaian terbesar ke-8 di daerah konflik pada 2019 dengan mengirimkan kontribusinya dengan mengirimkan 4.000 pasukan. (United Nations Security Council Report, 2018). Hal ini merupakan salah satu bukti Retno Marsudi menjadi Mediator yang baik. Menurut Hermann dalam karakteristik kepribadian politik, mediator merupakan “perantara” jika suatu negara memiliki konflik dan selalu berusaha menyelesaikan masalah global dengan menghindari intervensi dan memberikan implikasi bagi negara lain.

Karakteristik politik luar negeri Menteri Retno pun terlihat sebagai Independen Aktif, terbukti ketika menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia yang diwakili Menteri Retno Marsudi dipercayai memimpin tiga komite sanksi. Pertama mengenai sanksi kelompok al-Qaeda dan ISIS, kedua Kelompok Taliban di Afghanistan dan ketiga mengenai pencegahan penyebaran senjata pemusnah masal oleh aktor non negara (Hadayani, 2019). Begitupula ketika peristiwa teror terjadi di Afganistan, Iran, Filipina, Sri Langka, dan Selandia Baru. Indonesia memberikan sikap selalu menolak tindakan terorisme. Pencapaian lainnya adalah yang dilakukan Retno Marsudi selaku Menlu RI adalah dengan menandatangani perjanjian pembangunan klinik yang bernama “*Indonesia Islamic Center*” di Afganistan pada 11 Mei 2019 di Istana Presiden Bogor yang dihadiri oleh Afganistan-Pakistan-Indonesia. Pada dasarnya Indonesia berusaha mempertahankan kebebasan dalam menjalin hubungan sebanyak mungkin dengan negara-negara lain tanpa membahayakan hubungan yang terjalin dengan

komunitas internasional, hal tersebut pun selaras dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yaitu bebas Aktif.

Hal terpenting ketika Indonesia berhasil menjadi anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia mendapat kesempatan menjadi Presiden DK sebanyak dua kali, dan berhasil mengesahkan 4 Resolusi. (Kemlu, 2019). Secara keseluruhan, Menteri Retno Marsudi telah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam memperjuangkan kepentingan Republik Indonesia, tidak dapat dipungkiri juga bahwa Retno Marsudi telah memberikan sumbangsih yang besar dalam membangun citra Indonesia di mata dunia dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai, bagaimana faktor idiosinkratik Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dapat memenuhi kepentingan nasional sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB, tentunya peneliti akan membahas pencapaian pencapaian yang telah dilakukan Indonesia melalui diplomasi Retno Marsudi.

Pada penelitian ini, terdapat beberapa bahan acuan dari penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai rujukan, pertama, penelitian yang dibuat oleh Muhammad Rizky dari Universitas Komputer Indonesia pada tahun 2022 mengenai “Pengaruh Idiosinkratik Donald Trump Dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Iran (2016-2020)”. Dalam penelitian ini menganalisis mengenai pengaruh idiosinkratik Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dalam kebijakan luar negeri negaranya. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini menggunakan proses dari pengolahan data.

Peneliti melihat terdapat persamaan, yaitu meneliti mengenai faktor idiosinkratik suatu tokoh negara. Adapun perbedaan pada penelitian yang peneliti teliti ini mengenai Idiosinkratik Retno Marsudi selaku Menteri luar negeri Indonesia, sedangkan penelitian di atas meneliti mengenai Idionsinkratik Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat. Pembaharuan dalam penelitian penulis adalah perbedaan faktor idiosinkratik yang dibahas, terlebih lagi peneliti membahas bukan kacamata kepala negara, tetapi sebagai seorang perwakilan RI.

Menurut penelitian yang dibuat oleh Boike Adam Noor dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada Desember 2019 dengan judul “Alasan Indonesia Terpilih Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan keamanan PBB Periode 2019-2020”. Penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai sumber data dengan kerangka pemirikan yaitu konsep diplomasi dan politik luar negeri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan keamanan PBB pada periode 2019 – 2020 dikarenakan Indonesia menggunakan diplomasi secara bilateral dan multilateral serta menggunakan politik luar negeri bebas aktif sehingga memenangkan kursi anggota tidak tetap Dewan Kehormatan PBB pada periode 2019-2020. Dengan Kontribusi Indonesia yang mengupayakan suatu perdamaian dunia merupakan suatu alasan negara – negara anggota PBB memberikan kepercayaan kepada indonesia untuk menempati kursi tersebut. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai keanggotaan Indonesia sebagai dewan keamanan tidak tetap PBB, sedangkan perbedaanya penulis membahas mengenai bagaimana idiosinkratik Retno Marsudi terhadap pemenuhan kepentingan nasional sedangkan penelitian di atas membahas

mengenai alasan Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan keamanan PBB. kekurangan penelitian ini peneliti tidak menjelaskan terkait pencapaian yang telah dilakukan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB secara menyeluruh, hanya menyampaikan secara ringkas. Begitupula aktor negara yang memang melatar belakangi mengapa Indonesia bisa menjadi anggota tidak tetap DK PBB, dimana aktor tersebut adalah Retno Marsudi.

Penelitian yang dibuat oleh Nurrohmani Salsail Nafisah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada Februari 2021. Dengan judul “Peran Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan keamanan PBB Periode 2019 – 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah Peran indonesia dalam membantu menginisiasi pembahasan dan penyelesaian berbagai masalah di berbagai negara. Indonesia juga memainkan peran sebagai “*Bridge Builder*” sebagai jembatan antara negara anggotan dan menjalankan isu prioritas di Dewan keamanan. Meskipun Indonesia tidak memiliki hak veto, Indonesia dapat memanfaatkan posisi sebagai anggota tidak tetap dengan sangat baik. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas bagaimana peranan Indonesia saat menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti membahas mengenai dampak anggota tidak tetap dewan keamanan PBB terhadap kepentingan nasional, yaitu di Indonesia. Kekurangan dalam penelitian ini adalah data yang ada berasal dari studi pustaka jurnal, maupun data internet. Tidak ada informan dalam penelitian tersebut membuat data yang dihasilkan tidak menyeluruh, karena keterbatasan informasi yang didapatkan.

Dari penelitian yang dibuat oleh Aufa Ananta dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Strategi Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap *Belt And Road Initiative* Di Masa Presiden Joko Widodo Pada Tahun 2014-2019” penelitian ini memiliki kesimpulan di mana Indonesia di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki kegiatan strategis yang berpengaruh terhadap kerja sama *Belt and Road Initiative* terkhususkan di tahun 2014-2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu terdapat pembahasan mengenai strategis politik luar negeri Indonesia di mana seperti yang diketahui dari tahun 2014-2024 Indonesia memiliki pemimpin yang sama dengan Menteri Luar Negeri yang sama pula. Sehingga dalam strategi politik luar negeri terdapat persamaan yang signifikan. Kekurangan dalam penelitian ini adalah tidak membahas mengenai dampak dari kerjasama BRI ini.

Terakhir, penelitian oleh Jihan Mahligai Aini dari Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2018 dengan judul “Faktor Idiosinkratik Ma YingJeou Pada Kebijakan Luar Negeri Taiwan Melalui *Three No's Policy*”, terdapat persamaan dalam penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti mengenai faktor idiosinkratik. Hanya saja, perbedaannya, jika peneliti meneliti mengenai idiosinkratik Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sedangkan penelitian Jihan Mahligai Aini meneliti mengenai idiosinkratik Ma YingJeou dalam mengubah kebijakan luar negeri Taiwan terhadap China. Kekurangan penelitian ini hanya membahas mengenai satu faktor idiosinkratik Ma Yinjeou, yang seharusnya dalam membahas faktor idiosinkratik tidak hanya satu faktor, melainkan bisa lebih

dari satu. Penelitian ini membahas Ma Yinjeou sebagai mediator dalam mendamaikan hubungan antara Taiwan dan Tiongkok.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Idiosinkratik Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi Terhadap Pemenuhan Kepentingan Nasional Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa”

Penelitian ini tentunya didukung oleh Mata Kuliah pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, sebagai berikut :

1. Diplomasi dan Negosiasi.

Mata kuliah diplomasi dan negosiasi ini membantu peneliti memahami dasar-dasar berdiplomasi dan seni dalam bernegosiasi. Seperti jenis, peran, dan fungsi diplomasi. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga membantu peneliti memahami seberapa besar Diplomasi dapat terlibat dalam menghadapi urusan internasional.

2. Politik Luar Negeri Republik Indonesia

Menjelaskan mengenai suatu pola dan perilaku suatu negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dalam kancah internasional. Menghubungkan dari mulai historis dan ideologi yang dianut oleh negara berkepentingan dengan negara tujuan. Dalam mata kuliah memfokuskan mengenai politik luar negeri negara Indonesia.

3. Analisis Politik Luar Negeri

Menjelaskan bagaimana menganalisis politik luar negeri yang akhirnya berdampak kepada kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh suatu negara, mengkaitkan faktor-faktor internal suatu negara dalam pemenuhan kepentingan nasional di ranah internasional, dan mengkaitkan faktor-faktor eksternal dalam pemenuhan kebijakan luar negeri suatu negara.

4. Organisasi Internasional

Mata kuliah ini membantu peneliti dalam memahami mengenai mekanisme, kerjasama serta struktur organisasi sehingga organisasi internasional dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan bersama, serta mempelajari bagaimana sasaran organisasi internasional itu bisa tercapai.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Makro

Mengacu pada latar belakang yang sudah disampaikan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana pengaruh Idiosinkratik Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi terhadap pemenuhan kepentingan nasional Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa?”**.

1.2.2 Rumusan Masalah Mikro

Dalam penelitian ini masalah yang akan dibahas tentu akan berkembang seiring dengan waktu, hubungan variabel dengan variabel lain akan berkembang dan berhubungan menjadi suatu masalah yang akan diteliti. Maka, identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Faktor idiosinkratik apa saja yang terdapat dalam diri Retno Marsudi terhadap pemenuhan kepentingan nasional Indonesia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB?
2. Bagaimana upaya Retno Marsudi dalam mendorong indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB ?
3. Kepentingan nasional apa yang telah di capai Retno Marsudi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB?

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan pembatasan masalah untuk menetapkan parameter dan batasan pada topik yang akan dibahas sehingga pembahasan tetap jelas, konsisten, terstruktur dengan baik. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah tahun 2016-2020. Tahun 2016 merupakan upaya upaya Retno Marsudi dalam mendorong Indonesia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB, sedangkan pada tahun 2019-2020 terkait kebijakan yang digunakan Retno Marsudi dalam pemenuhan kepentingan nasional saat menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan faktor-faktor idiosinkratik yang digunakan dalam politik luar negeri.

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.5.1 Maksud Penelitian

Maksud dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaruh Idiosinkratik Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi terhadap pemenuhan kepentingan nasional sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB.

1.5.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis faktor idiosinkratik yang terdapat dalam diri Retno Marsudi terhadap pemenuhan kepentingan nasional Indonesia sebagai anggota KTe tetap dewan keamanan PBB.
2. Menganalisis upaya yang dilakukan Retno Marsudi dalam mendorong Indonesia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB.
3. Mengetahui kepentingan nasional yang telah di capai Retno Marsudi sebagai anggotan tidak tetap Dewan Keamanan.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca agar memahami gaya kepemimpinan seorang menteri luar negeri RI dalam memenuhi suatu kepentingan negara di kancah internasional dan secara khusus mengacu faktor-faktor idiosinkratik Retno Marsudi dalam melakukan hubungan luar negeri melalui perspektif politik luar negeri.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Sebagai syarat untuk penyelesaian tugas akhir untuk kelulusan di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Selain itu penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti sebagai buah karya ilmiah. Mengetahui perspektif, ilmu dan keterampilan baru di mana para pemimpin nasional mempengaruhi kebijakan luar negeri negara dalam pemenuhan kepentingan nasional.

2. Bagi Program Studi

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan kajian bagi mahasiswa ilmu hubungan internasional lain agar bisa memahami dan mempermudah penelitian selanjutnya mengenai idiosinkratik